



RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019



I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

II. GAMBARAN DAERAH

1. Kondisi Geografi Daerah

Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, yang jaraknya dari ibukota Provinsi ± 236 Km. Secara geografis wilayah Kabupaten Pangandaran berada pada $108^{\circ}30'$ sampai dengan $108^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'20''$ sampai $7^{\circ}50'20''$ Lintang Selatan. Dilihat di peta Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran terletak paling tenggara. Kabupaten Pangandaran mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya.
- ❖ Sebelah Selatan : Samudera Hindia.
- ❖ Sebelah Timur : Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya.

Topografi Kabupaten Pangandaran terdiri dari, dataran rendah, perbukitan dan dataran tinggi, daerah dataran tinggi perbukitan dengan topografi bergelombang terletak di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langkaplancar dan Kecamatan Cigugur, daerah dataran rendah dan perbukitan terletak di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Mangunjaya, daerah perbukitan dan dataran rendah berpantai terletak di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Cimerak.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Pangandaran dibagi kedalam 10 Kecamatan yang mencakup 93 Desa dan 427 Dusun. Terdapat 914 Rukun Warga (RW) dan 3.260 Rukun Tetangga (RT). Berikut adalah jumlah Desa, Dusun, RW dan RT perkecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa	Dusun	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Parigi	10	53	122	399
2.	Cijulang	7	38	90	253
3.	Cimerak	11	51	99	357
4.	Cigugur	7	39	64	200
5.	Langkaplancar	15	66	115	413
6.	Mangunjaya	5	28	47	233
7.	Padaherang	14	60	142	442
8.	Kalipucang	9	29	80	290
9.	Pangandaran	8	33	89	343
10.	Sidamulih	7	33	65	258
JUMLAH		93	427	915	3.188

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda dan BAPPEDA Kab. Pangandaran Tahun 2019

2. Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 adalah 422.615 jiwa terdiri dari 211.22 laki-laki dan 211.395 Perempuan. Berikut adalah gambaran luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Parigi	98,04	45.165	460,6
2.	Cijulang	93,16	28.001	291.2
3.	Cimerak	118,18	48.461	410,06
4.	Cigugur	97,29	22.720	233.5
5.	Langkaplancar	177,19	51.160	288.7
6.	Mangunjaya	63.03	32.986	523.3
7.	Padaherang	89.27	69.104	774,1
8.	Kalipucang	136,78	38.635	282.4
9.	Pangandaran	60,77	57.239	941,9
10.	Sidamulih	77,98	29.144	373,7
Total		1011,04	422.615	418,00

Sumber : DISDUKCAPIL Kab. Pangandaran Tahun 2019

III. VISI DAN MISI

1. Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Maka Visi Jangka Menengah (Tahun 2016-2021) Kabupaten Pangandaran adalah :

“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI
TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”

2. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI
“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani
	2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
	3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas
	4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal
	5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing
	6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

IV. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah maka digunakan indikator makro pembangunan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Adapun sebagai representasi ringkasan ketercapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 dituangkan dalam pencapaian Indikator Makro pembangunan daerah, yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PDRB sebagaimana tabel di bawah ini:

Perkembangan Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

No	Jenis Indikator	Nilai Capaian Tahun	
		2018	2019
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Jumlah Peduduk (orang)	420.512	422.615
	Jumlah Penduduk Laki-Laki (orang)	208.962	211.220
	Jumlah Penduduk Perempuan (orang)	208.601	211.395
2	Kepadatan Penduduk (orang/Km ²)	413	418
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,81	0,50
4	Laju Inflasi (%)	3,24	*)
5	Penduduk Miskin:		
	- Jumlah (Orang)	32.190	30.753
	- Persentase (%)	8,12	7,71
6	Indikator Ketenagakerjaan:		
	- Angkatan Kerja (Orang)	240.175	234.003
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,58	4,48
	- Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96,42	95,52
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM):	67,44	68,21
	- Indeks Pendidikan	58,71	59,07
	- Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,04	12,06
	- Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,58	7,67
	- Indeks Kesehatan	78,22	78,65
	- Angka Harapan Hidup (tahun)	70,84	71,12
	- Indeks Pengeluaran	66,81	68,32
	- Daya Beli Masyarakat (Rp.)	8.968.000,00	9.423.000,00
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,41	5,96
9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)	10.366.019,40	11.322.801,61
10	PDRB Atas Dasar Konstan (Juta Rp.)	7.315.263,42	7.750.924,24
11	PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (Rp.)	26.098.587,00	28.357.764,00
12	PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (Rp.)	18.417.681,00	19.412.058,00
13	Dependency Ratio (Angka Ketergantungan)	46,93	45,17
14	Sex Ration	99,82	99,91
15	Gini Ratio	0,34	*)

Sumber: 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, Tahun 2019
2. Data Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, Semester I Tahun 2019
Keterangan : *) Data Belum Tersedia

V. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian	Realisasi Capaian	Keterangan
1	Pendidikan	Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	64,85 %	
2	Pendidikan	Partisipasi Pendidikan Dasar	100 %	96,45 %	
3	Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	100 %	100 %	
4	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	100 %	
5	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %	99,75 %	
6	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	100 %	
7	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan balita	100 %	100 %	
8	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %	100 %	
9	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %	99,08 %	
10		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %	81,63 %	
11	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %	100 %	
12	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	100 %	
13	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %	100 %	
14	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	100 %	100 %	
15	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100 %	100 %	
16	Pekerjaan umum	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	100 %	100 %	
17	Pekerjaan umum	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100 %	
18	Perumahan rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah	100 %	0 %	Tidak terdapat

		yang layak huni bagi korban bencana kabupaten pangandaran			korban bencana
19	Perumahan rakyat	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten pangandaran	100 %	0 %	Tidak terdapat masyarakat yang direlokasi
20	Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	98 %	
21	Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan informasi rawan bencana	100 %	70 %	
22	Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	
23	Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	0,21 %	Sarana dan prasarana sebagai standar pelayanan SPM belum memenuhi standar dan anggaran kurang mencukupi
24	Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	0,37 %	
25	Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100 %	100 %	
26	Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100 %	100 %	

27	Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	100 %	142 %	
28	Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %	90 %	
29	Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100 %	100 %	

Sumber : Laporan Penerapan SPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

VI. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

1. HASIL EPPD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018

Sesuai ketentuan Pasal 9 PP Nomor 3 tahun 2007, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah provinsi Jawa Barat penerimaan LPPD tahun 2018 Kabupaten Pangandaran tanggal 29 Maret 2019 dengan tepat waktu.

Penilaian Tataran Pengambil Kebijakan mendapatkan skor 3,8310 atau dengan kategori prestasi sangat tinggi dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	Jumlah	%
IKK yang memperoleh kategori sangat tinggi	36	83,72
IKK yang memperoleh kategori tinggi	5	11,63
IKK yang memperoleh kategori prestasi sedang	2	4,65
IKK yang memperoleh prestasi rendah	0	0,00
IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0,00
jumlah	43	100,00

Aspek administrasi umum terdiri dari 8 aspek dengan 21 indikator kinerja kunci yang mencakup urusan wajib, pilihan, fungsi penunjang umum pemerintahan dan urusan pemerintahan dengan jumlah IKK sebanyak 654. Penilaian pada aspek umum mendapatkan skor 2,8894 atau dengan kategori prestasi tinggi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Skor	prestasi
1	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan	2,4411	T
2	Ketaatan terhd peraturan / UU	3,5294	ST
3	Penataan Kelembagaan	2,3382	T
4	Pengelolaan Kepegawaian	2,7676	T
5	Perencanaan pembangunan	3,5294	ST
6	Pengelolaan keuangan	1,8808	S
7	Pengelolaan barang milik	3,5294	ST
8	Pemberian fasilitas partisipasi terhadap masyarakat	3,5176	ST

Uraian	Jumlah	%
IKK yang memperoleh kategori sangat tinggi	433	68,73
IKK yang memperoleh kategori tinggi	22	3,49
IKK yang memperoleh kategori prestasi sedang	24	3,81
IKK yang memperoleh prestasi rendah	151	23,97
IKK yang tidak memperoleh prstasi karena tidak diisi angka capaian kinerja	0	0,00
IKK yang tidak memperoleh prstasi karena bukan urusan pilihan	0	0,00
jumlah	630	100,00

Indeks kesesuaian materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang eliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan penyajian Indikator Kinerja Kunci mendapatkan hasil penilaian skor 3,7500.

Berdasarkan hasil EKPPD di tingkat provinsi menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pangandaran mendapatkan peringkat sementara dari status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke 17 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan skor **3,3529** atau dengan **kategori prestasi Sangat Tinggi** atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD tahun 2018.

2.OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut:

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2019		CAPAIAN KINERJA
			TARGET	REALISASI	
1	Opini BPK terhadap LKPD	Status Laporan	WTP	WTP	100%

2	Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)	Skor	2	2	
3	Tingkat kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)	Skor	2	3	
4	Nilai AKIP	Nilai	B	B	
5	Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	87	87	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel memiliki 5 indikator kinerja sasaran dengan rincian : indikator sasaran mencapai target dan indikator sasaran tidak mencapai target. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 untuk indikator sasaran Opini BPK terhadap LKPD sebesar 100% dikategorikan baik. Analisis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK Terhadap			
Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%

Penilaian tahun 2019

Berdasarkan capaian dari Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran untuk mendukung Penilaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran tersebut diterapkan satu indikator sebagai berikut :

Dari pencapaian IKU yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, mendapatkan Nilai WTP dengan kriteria :

- 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual
- 2. Kecukupan pengungkapan dalam penyajian Laporan Keuangan
- 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
- 4. Efektifitas sistem pengendalian intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset
- 5. Penyampaian Laporan Keuangan yang tepat waktu.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong percepatan kabupaten/kota tersebut agar bisa membuat laporan keuangannya dengan baik.WTP memang bukan jaminan tidak adanya korupsi dalam LKPD.Namun, WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan baik dan benar.

VII. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

No	Uraian Fungsi Dan Bidang Pemerintahan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	13	97	125.857.348.474,00	115.977.723.217,00	92,15
2	Dinas Kesehatan	18	101	342.221.242.106,00	308.632.462.090,00	90,19
3	Dinas Pekerejaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17	193	241.895.986.873,00	188.797.861.352,00	78,05
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	33	1.908.715.000,00	1.865.757.768,00	97,75
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	47	12.533.610.000,00	12.185.335.463,00	97,22
6	Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi	9	33	1.289.582.000,00	1.267.195.005,00	98,26
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	9	38	7.091.996.000,00	6.998.293.791,00	98,68
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	34	2.168.361.000,00	2.096.701.009,00	96,70
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	46	5.415.386.500,00	5.172.022.691,00	95,51
10	Dinas Perhubungan	6	30	8.227.798.897,00	8.169.077.732,00	99,29
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8	35	6.833.874.000,00	6.252.079.505,00	91,49
12	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu	6	35	1.391.460.000,00	1.287.850.084,00	92,55
13	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	9	39	6.401.294.000,00	6.060.933.730,00	94,68
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	32	3.245.353.250,00	3.184.817.129,00	98,13
15	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	6	50	4.305.189.000,00	4.169.475.293,00	96,85
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13	52	52.731.630.880,00	49.973.433.986,00	94,77
17	Dinas Pertanian	6	35	7.142.520.850,00	6.465.364.430,00	90,52
18	Sekretariat DPRD	6	48	11.873.893.000,00	11.656.414.028,00	98,17
19	Inspektorat	7	29	1.513.770.879,00	1.482.334.717,00	97,92
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8	49	4.520.390.000,00	4.294.704.685,00	95,01
21	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	73	15.396.985.674,00	14.524.458.147,00	94,33
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	5	45	8.185.327.698,00	7.859.315.425,00	96,02
23	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	6	31	6.437.806.000,00	6.416.542.266,00	99,67
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	28	1.102.330.000,00	993.027.006,00	90,08
25	Sekretariat Daerah	21	95	20.549.902.100,00	18.957.135.726,00	92,25
26	Kecamatan Cijulang	3	25	285.899.000,00	283.550.824,00	99,18
27	Kecamatan Cimerak	3	25	288.287.000,00	266.841.039,00	92,56
28	Kecamatan Parigi	3	25	280.468.000,00	235.722.595,00	84,05
29	Kecamatan Cigugur	4	27	279.542.000,00	276.432.870,00	98,89
30	Kecamatan Langkaplancar	4	27	300.000.000,00	290.216.300,00	96,74
31	Kecamatan Mangunjaya	3	26	289.306.000,00	288.692.813,00	99,79
32	Kecamatan Padaherang	3	25	299.388.000,00	288.429.943,00	96,34
33	Kecamatan Kalipucang	3	25	292.029.000,00	290.417.916,00	99,45
34	Kecamatan Pangandaran	3	26	297.312.000,00	284.121.900,00	95,56
35	Kecamatan Sidamulih	3	24	294.810.000,00	262.852.517,00	89,16
JUMLAH		250	1.583	903.148.795.181,00	797.507.594.992,00	88,30

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 2019, Sebelum Audit BPK RI

VIII. INOVASI DAERAH

NO	NAMA INOVASI DAERAH	TAHUN PELAKSANAAN	SKPD PENGUSUL
[1]	[2]	[4]	[5]
1	SIMUKE HOT (Aksi UMKM Masuk Ke Hotel)	2019	Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM
2	SI KOMIK-Desa (Sistem Kompilasi Manajemen dan Informasi Kepegawaian-Desa)	2019	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	CAKKIAL (Cetak KIA Langsung)	2019	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	KALIMAH (Satangkal Saimah)	2019	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5	LEMPAR JARING NELAYAN (Literasi Pangandaran Dengan Kerjasama Perpustakaan Keliling Dan Silanglayan)	2019	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	PIL B3 (Permohonan Izin Limbah) B3	2019	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
7	INOVASI PENANAMAN PADI PADA LAHAN PASANG SURUT AIR LAUT DI KELOMPOK TANI SRI MUKTI DUSUN SUCEN RT 01 RW 05 DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN	2019	Dinas Pertanian
8	JURIG NELAYAN (Dijugjung Diingkid Untuk Nelayan)	2019	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
9	SAPU JAGAT (Satuan Polisi Urusan Jaga PERDA dan TRANTIBUM)	2019	Satuan Polisi Pamong Praja
10	SALUD (Sadar Lalu Lintas Usia Dini)	2019	Dinas Perhubungan
11	Program Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1)	2019	Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi
12	HOTANA (Hotel Tangguh Bencana)	2019	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	SIRENGGANIS (Sistim Informasi erencanaan, Penganggaran, Pengelolaan, Pengendalian Dan Pelaporan	2019	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

14	SIMRAL GREAT (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Terintegrasi Berbasis Elektronik)	2019	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	ASINPEDA (Aplikasi Sinkronisasi Pegawai Daerah)	2019	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16	PPBO (Pelayanan Penelitian Berbasis Online)	2019	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17	PELAKOR (Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Pupuk Organik)	2019	Kecamatan Mangunjaya
18	TIM ADA SIDIA (Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Berbasis Medsos)	2019	Kecamatan Sidamulih
19	IKET PANGSI (Inovatif, Kompeten, Efektif, Transparan, Gampang Dan Singkat)	2019	Kecamatan Cigugur
20	SIAP KOMANDAN (Sistim Akuntabilitas Pembinaan Komunikasi Antar Desa Di Kecamatan)	2019	Kecamatan Langkap Lancar
21	SABA MASJID (Saling Asih Babarengan Masyarakat, Asal Sinegritas Janten Inovasi Daerah)	2019	Kecamatan Cijulang
22	SEMIBAL (Senin Minum Herbal)	2019	Puskesmas Padaherang
23	INSASI E (Instruktur Asi Eksklusif)	2019	Puskesmas Padaherang
24	CERIA (Cara Efektif Ringankan Ingatan Anda)	2019	Puskesmas Pangandaran
25	JUMPA FANS (Jaringan Untuk Membantu Penurunan AKI-AKB Fokus Antenatalcare Serentak)	2019	Puskesmas Pangandaran
26	BUPATI (Buku Panduan Antropometri Gizi)	2019	Puskesmas Cikembulan
27	Posyandu Remaja “RESIK” (Remaja Sehat, Inovatif, dan Kreatif)	2019	Puskesmas Parigi
28	CAFE LATANSA (Cafe Lansia Sehat Dan Sejahtera)	2019	Puskesmas Selasari
29	Peran SI CANTIK dan Generasi DETIC (Strategi Informasi Cerita Tentang Jentik & Generasi DEtektif jenTik Cilik) dalam upaya	2019	Puskesmas Cijulang

	pengendalian penularan penyakit DBD		
30	PETASAN (Penjaringan Penyakit Tidak Menular Di Pangaosan)	2019	Puskesmas Legokjawa
31	ASASI (Ayah Sayang Anak Dan Istri)	2019	Puskesmas Cigugur
32	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK WANITA TANI (KWT)	2019	Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Parigi

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

IX. RINGKASAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN	NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA
Penunjang Urusan Pemerintahan (Fungsi Penelitian)	1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten	9
	2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	100 %
	3	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	7.69 %
	4	Persentase PAD	1.01 %
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	10.28 %
	6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.91
	7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2
	8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %

	9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	26.73 %
	10	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	49.87 %
	11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	8 %
	12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	87.5 %
	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	89.41 %
	14	Assets management	Ya
	15	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0.31 %
	16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	93.57 %
	17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	85 %
Pemerintahan Umum	1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	10
	2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	11

X. Penutup

Pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu bentuk integritas dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjembatani terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar *stakeholder* terkait guna mewujudkan *good local governance* dan secara yuridis formil didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan kerangka pemahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2019 wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Gubernur Jawa Barat dalam kerangka mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2019 dan pada gilirannya akan memberikan *feedback* secara simultan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun-tahun berikutnya.

Parigi, 27 Maret 2020

BUPATI PANGANDARAN

Ttd.

H. JEJE WIRADINATA